

**KOORDINASI STAKEHOLDER DALAM PELAYANAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS
TEMUAN DI INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Diajukan Oleh:

FEBI MELATI

NIM.07011282025071

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MARET 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

KOORDINASI STAKEHOLDER DALAM PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN DI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

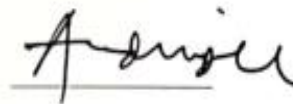
Oleh:

Febi Melati
NIM. 07011282025071

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 7 Maret 2024

Pembimbing

Dr. Andy Alfatih, MPA.
NIP. 196024121990011001



Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

KOORDINASI STAKEHOLDER DALAM PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN DI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Oleh: Febi Melati

NIM.07011282025071

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada tanggal 27 Maret 2024

dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Pembimbing

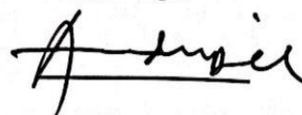
Dr. Andy Alfatih, MPA
NIP. 196024121990011001

Penguji:

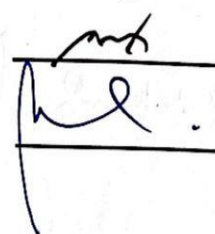
1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989121001

2. Junaidi, S.IP., M.Si
NIP.197903092008021009

Tanda Tangan



Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua Jurusan Administrasi Publik



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febi Melati

NIM : 07011282025071

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bersungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Koordinasi Stakeholder Dalam Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan Di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan”, ini benar-benar hasil karya Saya sendiri dan Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengintipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau terdapat pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, Saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada Saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan,

Indralaya, 7 Maret 2024



Febi Melati

NIM.07011282025071

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Teruslah Berjuang
Jangan Pernah Takut Mencoba
Because Nothing Imposibble”

-FM-

Atas ridho Allah Swt, Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua saya yaitu Ayah saya Armansyah dan Ibu Irawati yang selalu memberikan doa serta support hingga saya mampu menyelesaikan perkuliahan.
2. Seluruh Keluarga besar saya.
3. Dosen pembimbing saya.
4. Seluruh Dosen dan pegawai FISIP Unsri.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan saya.
6. Almamater kampus kebanggaan saya.

ABSTRAK

ABSTRAK
KOORDINASI STAKEHOLDER DALAM PELAYANAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS
TEMUAN DI INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:

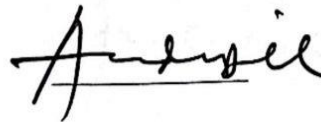
Febi Melati 07011282025071

Penelitian ini membahas Koordinasi Stakeholder Dalam Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan Di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana tingkat Koordinasi Stakeholder dalam pelayanan penerbitan surat keterangan bebas temuan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi oleh Soewarno Hadayaningrat, dengan lima indikator utama: Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan Komitmen, dan Insentif Koordinasi, dan Kontinuitas Perencanaan. Permasalahan yang diteliti adalah seberapa sadarnya stakeholder dalam berkoordinasi dan berkomitmen untuk memastikan pegawai bebas dari masalah aset dan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pelayanan penerbitan surat keterangan bebas temuan di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dinilai cukup baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu diperbaiki guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi. Dengan demikian, hasil koordinasi yang lebih baik diharapkan dapat memastikan bahwa surat keterangan yang diterbitkan oleh Inspektorat benar-benar menjamin bahwa pegawai bebas dari masalah aset dan keuangan, dengan mengurangi kasus temuan berulang di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci: Koordinasi, Stakeholder, Surat Bebas temuan, Pelayanan Publik, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pembimbing

Dr. Andy Alfatih, MPA.
NIP. 196024121990011001



Indralaya, 27 Maret 2024
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001



ABSTRACT

ABSTRACT

KOORDINASI STAKEHOLDER DALAM PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN DI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:

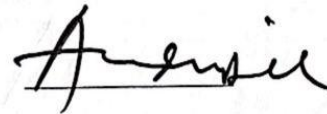
Febi Melati 07011282025071

This research discusses stakeholder coordination in issuing the Free Finding Statement at the Regional Inspectorate of South Sumatra Province. The research objective is to understand the level of coordination among stakeholders in the issuance process of the statement. This research employs coordination theory by Soewarno Handayani, with five main indicators: Communication, Awareness of the Importance of Coordination, Participant Competence, Agreement Commitment, Coordination Incentives, and Planning Continuity. The problem under investigation is how aware stakeholders are in coordinating and committing to ensure that employees are free from asset and financial issues. This research utilizes a qualitative research method. The results indicate that the coordination of issuing the Free Finding Statement at the Regional Inspectorate of South Sumatra Province is considered fairly good, but there are still several indicators that need improvement to enhance coordination effectiveness and efficiency. Thus, better coordination results are expected to ensure that the statement issued by the Inspectorate genuinely guarantees that employees are free from asset and financial issues, thereby reducing repeated findings cases at the Regional Inspectorate of South Sumatra Province.

Keywords: Coordination, Free finding letter, Stakeholder, public service, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pembimbing

Dr. Andy Alfatih, MPA.
NIP. 196024121990011001



Indralaya, 27 Maret 2024
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001



vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kerahmatan dan ridhonya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul *KOORDINASI STAKEHOLDER DALAM PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN DI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN*. Skripsi ini dibuat dari hasil praktek kerja dan pengamatan di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, saya sangat menyadari dalam pelaksanaan penelitian ini banyak kekurangan dan alhamdulillah memperoleh banyak bimbingan dan ilmu yang insyaallah akan berguna bagi saya di masa depan. Demikian dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT.** Yang senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran selama penulis melakukan penelitian sampai dengan selesai.
2. **Kedua Orang Tua** penulis yang selalu memberikan dukungan, doa dan cintanya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini.
3. **Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.** selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. **Dr. Andy Alfatih, MPA.** selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah membimbing, meluangkan waktu dan memberikan ilmunya kepada penulis.
5. **Adi Baladika, S.H.** selaku pembimbing teknis di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah membimbing, memberikan pengalaman, dan ilmunya.
6. **Bapak dan Ibu Pegawai** di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. **Semua Pihak** yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penelitian hingga penyelesaian proposal ini.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan proposal penelitian. Segala bentuk kritik dan saran akan dengan senang hati diterima dan diharapkan dapat membantu dalam penulisan skripsi selanjutnya agar lebih baik lagi, atas segalanya saya ucapkan terima kasih.

Palembang, 7 Maret 2023

Febi Melati

NIM. 07011282025071

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori	13
2.2 Konsep Koordinasi.....	13
2.2.1 Pengertian Koordinasi.....	13
2.2.2 Ciri- Ciri Koordinasi	15
2.2.3 Bentuk – Bentuk Koordinasi.....	16

2.2.4 Fungsi Koordinasi	18
2.2.5 Syarat – Syarat Koordinasi.....	19
2.2.6 Manfaat Pentingnya Koordinasi.....	19
2.2.7 Hambatan Dalam Pelaksanaan Koordinasi	20
2.3 Konsep Stakeholder	21
2.4 Manajemen Kepegawaian	22
2.4.1 Tujuan Manajemen Kepegawaian.....	24
2.4.2 Dasar Hukum Manajemen Kepegawaian.....	24
2.4.3 Fungsi Manajemen.....	24
2.4.4 Unsur – Unsur Pegawai Negri Sipil.....	25
2.4.5 Prinsip -Prinsip Dasar Manajemen.....	26
2.5 Pelayanan Publik.....	26
2.5.1 Asas- Asas Pelayanan Publik	27
2.5.2 Standar Pelayanan Publik.....	28
2.5.3 Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan.....	29
2.5.4 Syarat Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan	30
2.5.5 Temuan Audit Berulang	30
2.6 Beberapa Teori Koordinasi Stakeholder	31
2.6.1 Teori Koordinasi Menurut Fayol.....	31
2.6.2 Teori Koordinasi Menurut Ndraha	31
2.6.3 Teori Koordinasi Menurut Hadayaningrat	32
2.6.4 Teori Koordinasi Menurut Hasibuan.....	34
2.7 Teori kordinasi yang digunakan dalam penelitian ini	35
2.8 Kerangka Teori.....	37
2.9 Kerangka Pemikiran.....	40
2.10 Penelitian Terdahulu.....	42

2.11 Hipotesis Deskriptif.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Rancangan Penelitian (Desain Penelitian)	50
3.2 Definisi Konsep.....	50
3.3 Fokus Penelitian.....	51
3.4 Unit Analisis dan Unit Observasi.....	53
3.5 Informan.....	53
3.5.1 Kriteria Informan	53
3.5.2 Key Informan	54
3.6 Data dan Sumber Data	54
3.6.1 Data	54
3.6.2 Sumber Data.....	55
3.7 Teknik Pengumpulan Data	55
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	56
3.9 Teknik Analisis Data	57
3.10 Sistematika Penulisan.....	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	61
4.1.1 Profil Instansi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	61
4.1.2 Visi dan Misi	62
4.1.3 Struktur Organisasi.....	63
4.2 Deskripsi Informan Penelitian.....	69
4.3 Hasil Penelitian	70
4.3.1 Komunikasi	71
4.3.1.1 Kejelasan Pesan.....	71
4.3.1.2 Saluran Komunikasi.....	74

4.3.2 Kesadaran Pentingnya Koordinasi	78
4.3.2.1 Pengetahuan Pelaksana Terhadap Koordinasi.....	78
4.3.2.2 Ketaatan pelaksana terhadap hasil koordinasi.....	81
4.3.3 Kompetensi Partisipan	86
4.3.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM).....	86
4.3.4 Kesepakatan Komitmen Insentif Koordinasi	89
4.3.4.1 Kesepahaman	89
4.3.4.2 Partisipasi aktif.....	92
4.3.4.3 Bentuk Insentif Bagi pegawai	93
4.3.5 Kontinuitas Perencanaan.....	95
4.3.5.1 Umpan Balik	95
4.4 Pembahasan Penelitian.....	98
4.5 Faktor – Faktor Mempengaruhi Koordinasi	99
BAB V PENUTUP	101
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah Surat Keterangan Bebas Temuan yang diterbitkan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2020-2023	6
Tabel 1. 2 Alasan Pemilihan Judul	9
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	51
Tabel 4. 1 Informan Penelitian.....	69
Tabel 4. 2 Kejelasan Pesan Di Bagian Pelayanan Penerbitan Surat Bebas Temuan Di Kantor Inspektorat.....	73
Tabel 4. 3 Saluran Komunikasi Yang Ada Di Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel ..	75
Tabel 4. 4 Pengetahuan Pelaksana Terhadap Koordinasi Penerbitan Surat Bebas Temuan Di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel	80
Tabel 4. 5 Ketaatan Pelaksana Terhadap Hasil Koordinasi.....	83
Tabel 4. 6 SDM Yang Terlibat Dalam Koordinasi Pelayanan Penerbitan Surat Bebas Temuan.....	88
Tabel 4. 7 Kesepahaman pegawai inspektorat dalam pelayanan penerbitan surat bebas temuan.....	90
Tabel 4. 8 Patisipasi Aktif Pegawai Inspektorat.....	92
Tabel 4. 9 Bentuk Insentif Pegawai Inspektorat.....	94
Tabel 4. 10 Umpan Balik	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Surat Keterangan Bebas Temuan	5
Gambar 1. 2 Presentase Layanan Manajemen ASN yang berbasis Digital Tahun 2020 s.d 2022	8
Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data.....	59
Gambar 4. 1 Website Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	77
Gambar 4. 3 Perbandingan Data Mutasi Pegawai Dengan Data Jumlah Surat Yang Diterbitkan Inspektorat.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	109
Lampiran 2 Sk Pembimbing Skripsi	112
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	114
Lampiran 4 Surat Balasan Izin Penelitian.....	115
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi.....	116
Lampiran 6 Validasi Plagiat Skripsi	117
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara	118
Lampiran 8 Form Perbaikan Ujian Skripsi	119

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
BKD	: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SKBT	: Surat Keterangan Bebas Temuan
SKP	: Kinerja Pegawai
SKPD	: Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SOP	: Standar Opreasional Prosedur
PNS	: Pegawai Negeri Sipil

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah salah satu negara yang mana memiliki presentase rendah dalam sektor pelayanan publik, hal ini tentu merugikan dan tentunya sungguh meresahkan masyarakat di setiap wilayah di Indonesia. Kualitas menjadi point terpenting yang harus dimiliki seorang aparatur pelayanan publik, dimana di era reformasi seperti sekarang tuntutan Pelayanan yang diberikan harus profesional dan menerapkan prinsip tanggung jawab tanpa adanya diskriminasi atau membeda-bedakan pihak tertentu.

Penerapan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintah memiliki sejumlah manfaat yang signifikan, dimana pentingnya koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintah ialah suatu aspek krusial guna menjaga keseimbangan dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Koordinasi ini melibatkan berbagai elemen, seperti departemen, lembaga, dan unit-unit kerja pemerintah yang beroperasi untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dengan adanya koordinasi dapat mengurangi risiko tumpang tindih tugas dan tanggung jawab antardepartemen atau lembaga, sehingga menghindari pemborosan sumber daya. Kedua, koordinasi memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efisien, mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi, dan meningkatkan kapasitas pemerintah dalam merespons perubahan kondisi internal maupun eksternal. Selain itu, melalui koordinasi, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih holistik dan terintegrasi, mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Menurut (Rasyid, 1998) Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus sesuai dengan harapan masyarakat yang tentunya menginginkan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan yaitu bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Pemberian pelayanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan memang menjadi bagian yang perlu dicermati dan juga membutuhkan koordinasi berbagai pihak. Dalam konteks ini, koordinasi bukan sekadar tanggung jawab satu entitas, melainkan merupakan upaya bersama untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, mencegah tumpang tindih, dan memastikan bahwa setiap elemen pemerintahan berkontribusi secara sinergis. Saat ini masih sering dirasakan bahwa kualitas layanan minimum sekalipun masih jauh dari harapan masyarakat.

Koordinasi stakeholder menjadi inti dari penyelenggaraan pemerintah yang efektif. Stakeholder melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan kontribusi dalam kebijakan, program, dan layanan pemerintah. Salah satu organisasi pelayanan publik yakni Inspektorat dimana, di lingkungan pelayanan publik, Inspektorat bertanggung jawab untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Koordinasi stakeholder dapat membantu

membangun kerangka kerja yang memungkinkan pihak-pihak terkait untuk berbagi informasi dan bekerja sama dalam memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan aturan hukum. Inspektorat melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga-lembaga pemerintah pusat, masyarakat, dan sektor swasta. Koordinasi dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan tugas Inspektorat, serta untuk mengoptimalkan kontribusi masing-masing stakeholder.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, seperti Inspektorat daerah lainnya di Indonesia, bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah di tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota. Tugas utama mereka adalah untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta kinerja organisasi di wilayah. Dalam penelitian ini penulis memilih Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai lokasi penelitian penulis.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Instansi bidang pengawasan Pemerintah di Sumatera Selatan yang berkoordinasi secara langsung di bawah Gubernur. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan instansi lainnya, Inspektorat tentunya memiliki berbagai kebijakan serta program sebagai upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, juga turut berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan kebijakan publik guna pengendalian intern pemerintah. Pada kebijakan publik terdapat tiga proses yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

melakukan ketiga dari proses kebijakan publik. Dalam melaksanakan pengawasan internal, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya terbatas pada kegiatan pengawasan/audit tapi juga melaksanakan fungsi pembinaan terhadap satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata cara Pelaksanaan Mutasi, pada Bab II Pasal 3 angka (1) Huruf J disebutkan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi ialah Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT), yang diterbitkan oleh Inspektorat dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut berasal.

Surat Keterangan Bebas Temuan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak memiliki tanggungan temuan atau tagihan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun hasil pengawasan Inspektorat. Pihak yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Bebas Temuan hanyalah inspektorat yang mana dalam penelitian ini yaitu Inspektorat daerah provinsi Sumatera Selatan. Dalam konteks Koordinasi *stakeholder* penilaian tingkat keberhasilan pelayanan penerbitan surat keterangan bebas temuan bukan tentang pencapaian tujuan seberapa banyak surat yang telah diterbitkan namun konteksnya adalah mengenai kualitas dari proses pengawasan dan pemeriksaan sebelum diterbitkannya Surat Keterangan Bebas Temuan tersebut. Bahkan Inspektorat telah melakukan berbagai upaya dalam meminimalisir adanya temuan

berulang dalam bentuk pembinaan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), namun pada kenyataannya dapat dikatakan belum efektif.

Gambar 1. 1 Surat Keterangan Bebas Temuan



Sumber: Arsip Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan tinjauan kembali tentang Koordinasi Stakeholder Dalam Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan yang pada kenyataannya dapat dikatakan belum efektif dimana ada beberapa fenomena yang menjadi alasan penelitian ini yakni:

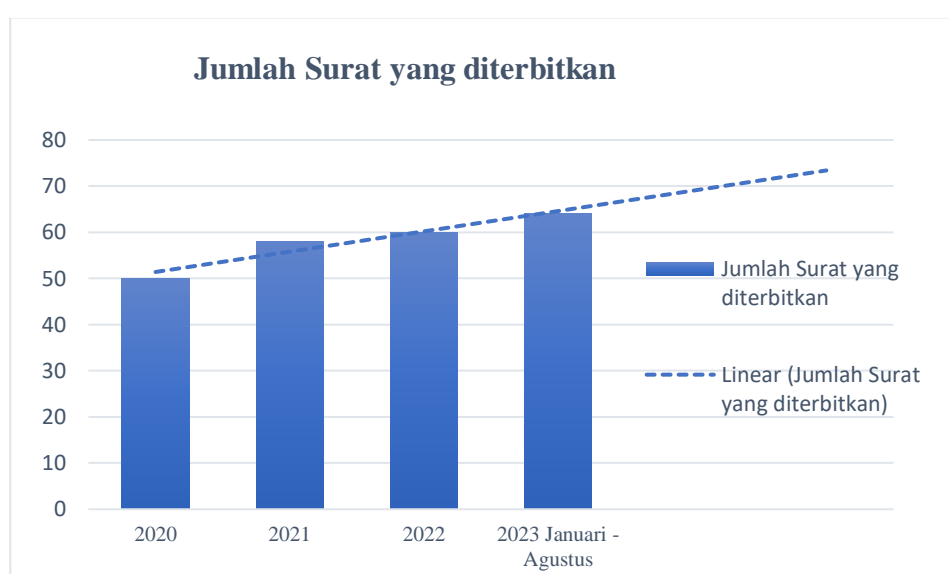
1. Kurangnya Komunikasi Selama Pelaksanaan Audit
2. Kurangnya kompetensi auditor dalam pengembangan temuan
3. Belum Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi Dengan Baik

Berikut alasan tersebut akan diuraikan dibawah ini:

1. Kurangnya Komunikasi Selama Pelaksanaan Audit

Kebutuhan akan Komunikasi selama pelaksanaan audit menjadi aspek krusial guna kelancaran auditor dalam mencari dan menganalisis bukti-bukti audit yang dibutuhkan. Adapun komunikasi dalam pelaksanaan audit terjalin antara yaitu: auditor dengan internal tim, Auditor dengan pemohon serta komunikasi instansi auditor dengan pihak lain yang terkait.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Surat Keterangan Bebas Temuan yang diterbitkan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2020-2023



Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Data Arsip Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2020-2023

Dari tabel 1.1 ini menunjukkan grafik data bahwa adanya pertambahan penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan setiap tahunnya, namun berdasarkan dilampirkan jumlah surat yang terbit tidak sepenuhnya menjamin ASN bebas dari masalah aset maupun kasus temuan berulang. Hal ini menunjukkan Kurangnya komunikasi selama pelaksanaan audit, dimana Hubungan komunikasi antara auditor Inspektorat dengan pemohon serta dengan pihak lain yang terkait, tidak berjalan secara efektif.

Bahkan faktanya dari hasil observasi masih banyak pemohon (ASN) yang langsung datang sendiri ke kantor padahal secara prosedur/ koordinasi administratif pihak yang berwenang mengajukan adalah dinas/instansi asal.

2. Kurangnya Kompetensi Auditor Dalam Pengembangan Temuan

Dalam Standar umum nomor 1210 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) menegaskan bahwa seorang auditor harus memiliki kualifikasi yang mencakup pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk menangani tanggung jawabnya. Pentingnya pengembangan temuan dalam audit dijelaskan sebagai faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan tugas auditor.

Dalam konteks Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, pelaksanaan audit menunjukkan kelemahan pada personil auditor yang tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam mengembangkan temuan audit. Terdapat kesalahan dalam tahapan audit, di mana penyebab temuan tidak diperbaiki secara menyeluruh, dan rekomendasi yang diberikan tidak mengatasi akar permasalahan serta sulit untuk dilaksanakan. Keadaan ini berpotensi menyulitkan proses tindak lanjut terhadap temuan audit, yang pada gilirannya dapat menghambat implementasi langkah-langkah perbaikan yang sesuai dan meningkatkan risiko terulangnya temuan serupa di masa depan.

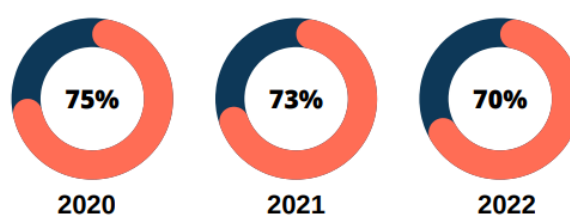
Dampaknya, kurangnya kompetensi dalam pengembangan temuan audit di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat merugikan, karena hal ini

dapat menghambat efektivitas tindak lanjut, mencegah perbaikan yang tepat, dan meningkatkan potensi terjadinya kesalahan serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kompetensi personil auditor dan peningkatan kualitas pelaksanaan audit untuk memastikan hasil audit yang lebih efektif dan implementasi rekomendasi yang tepat.

3. Belum Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi Dengan Baik

Dalam era digital, teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran besar dalam meningkatkan koordinasi stakeholder. Platform kolaboratif, jejaring sosial, dan alat-alat komunikasi online memfasilitasi pertukaran informasi dan pendapat antar *Stakeholder* dengan lebih cepat dan efisien. Ini memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap masukan dan umpan balik dari berbagai pihak.

Gambar 1. 2 Presentase Layanan Manajemen ASN yang berbasis Digital Tahun 2020 s.d 2022



Grafik 20. Tren Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital Tahun 2020 s.d. 2022

Sumber: Laporan Kinerja BKN 2022

Berdasarkan Gambar 2 ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, realisasi indikator kinerja utama layanan manajemen ASN berbasis digital mengalami penurunan sekitar 3,33% dikarenakan sepanjang tahun 2022 BKN terus berupaya

untuk melakukan penyederhanaan proses di layanan mutasi kepegawaian. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum memanfaatkan teknologi informasi dengan baik sesuai perkembangan zaman, dimana hal ini diperkuat lagi ketika peneliti mencoba untuk mengakses *website* Inspektorat yang mana hasilnya web tersebut Error dan tidak dapat dibuka.

Tabel 1. 2 Alasan Pemilihan Judul

No	Bentuk Kesadaran	Keterangan
1.	Kurangnya Komunikasi Selama Pelaksanaan Audit	Kurangnya komunikasi selama pelaksanaan audit, dimana Hubungan komunikasi antara auditor Inspektorat dengan pemohon serta dengan pihak lain yang terkait, tidak berjalan secara efektif. Banyak pemohon (ASN) yang langsung datang sendiri ke kantor padahal secara prosedur pihak yang berwenang mengajukan adalah dinas/instansi asal.
2.	Kurangnya Kompetensi Auditor Dalam Pengembangan Temuan	Pelaksanaan audit menunjukkan kelemahan pada personil auditor yang tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam mengembangkan temuan audit. Terdapat kesalahan dalam tahapan audit, di mana penyebab temuan tidak diperbaiki secara menyeluruh, dan rekomendasi yang

		diberikan tidak mengatasi akar permasalahan serta sulit untuk dilaksanakan.
3.	Belum Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi Dengan Baik	Masih diurus secara manual tidak memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dimana <i>website</i> Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami error sehingga tidak dapat dibuka.

Dari alasan diatas mengindikasikan bahwa masih adanya masalah-masalah yang terjadi dalam Koordinasi pelayanan penerbitan surat keterangan bebas temuan. Harapan yang tak sesuai ekspektasi, nyatanya selama ini surat yang telah diterbitkan belum menjamin ASN bebas sepenuhnya dari masalah aset dan keuangan. Maka kita tahu bahwa Pentingnya Koordinasi dan pengawasan dalam Pelaksanaan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Bebas Temuan sebagai alat pengendali intern pegawai akan berjalan baik jika didukung dengan pelayanan berkualitas tinggi serta koordinasi *Stakeholder* yang optimal. Disinilah permasalahan utama mengenai pembuatan hingga penerbitan surat, apakah selama ini proses yang dilakukan melalui koordinasi yang baik antar *Stakeholder* dan pemeriksaan yang ketat sesuai dengan alur/prosedur yang ada atau hanya sebatas formalitas saja? Tentu kita tau bahwa tak ada yang akan berjalan mulus, ada berbagai faktor yang mempengaruhi hal ini. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Koordinasi Stakeholder Dalam Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan Di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang tersebut adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Koordinasi Stakeholder Dalam Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan Di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Faktor- Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Koordinasi Stakeholder Dalam Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan Di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini terdapat dua (2) Tujuan Penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Koordinasi Stakeholder Dalam Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan Di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk Mengetahui Faktor- Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Koordinasi Stakeholder Dalam Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan Di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan, karena akan menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang Koordinasi Stakeholder dalam pelayanan serta menambah pengetahuan dan pemahaman dalam lingkup administrasi publik dan manajemen kepegawaian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Stakeholder di lingkup Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan koordinasi dan pengawasan sebelum diterbitkannya surat keterangan bebas temuan sebagai alat pengendali internal dimasa yang akan datang sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Jurnal

- Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal. 166
- Alaslan, A., & Mustanir, A. (2023). *MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK* (Yanto, Ed.; Pertama). <https://www.researchgate.net/publication/372247230>
- Ahungsehiwu, A., Daud, A., Liando, M., & Londa, Y. (2017). *Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV)*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Fayol, H. (1965). *General And Industrial Management*. The Riberside Press Cambridge.
- George, M. , & A. A. J. (2004). *Gaining insight into patients' beliefs using qualitative research methodologies*. *Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology* (Vol. 4, Nomor 3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1097/00130832-200406000-00008>
- Hadayaningrat, S. (1990). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung.
- Handoko. (2009). *Manajemen*. BPFE.
- Handayani, Fitri, and Hardi Warsono. "Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang." *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 6, 2017, pp. 40-53.
- Hasibuan, Ma. (2007). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Ismail, Y. (2018). *Analisis-Kualitas-Pelayanan-Publik-Pada-Dinas-Tata-Kota-dan-Pertamanan-Kota-Gorontalo*.

- Kusuma, W. (2014). *Dinamika Hubungan Inspektorat Dengan Obyek Pemeriksaan Dalam Penanganan Temuan Pemeriksaan Yang Berulang (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Kotler, M. (2005). Neighborhood Government: The Local Foundations Of Political Life. Menggunakan Pendekatan Lean Servperf (Lean Service Dan Serviceperformance)(Studi Kasus Rumah Sakit X). *Spektrum Industri*, 11(2), 133.
- Isminarsih, Prasetyono dan Bambang Haryadi. 2015. Temuan Berulang dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Studi Pada Inspektorat Kabupaten X). Program Studi Magister Akuntansi. Universitas Trunojoyo Madura.
- Mahfud, A., Haryono, S., & Anggraeni, N. L. (2019). *Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglebok, Kabupaten Blitar*. 3(12), 2070–2076.
- Miles, & Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3 ed.). SAGE.
- Moekijat. (1985). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen Perusahaan*. Mandar Maju Bandung.
- Mooney, J. (1982). *The Principle of Organization*. Harper & Brother.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Cetakan 2 Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2015). *Kybernology*. Rineka Cipta.
- Rai, I. G. A. (2008). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Rasyid. (1998). *Pelayanan Publik*. Bumi Aksara.
- Rusdina, I., & Sokardjo, D. (t.t.). *PENGARUH KOORDINASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS ELEKTRONIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT*. www.journal.uniga.ac.id

Rahayu, A. D., & Amrin, R. N. (2022). Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di kabupaten Wonosobo. *Tunas Agraria*, 5(3), 165–181. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.182>

Robert. 1996. Pelayanan publik, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta Simamora, Henry. 2002. Auditing. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung.

Sugandha. (1991). *Koordinasi Alat Pemesatu Gerak Administrasi*. Intermedia: Jakarta.

Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.